



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

Pages: 1237-1244

Peran Digitalisasi Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi di Bali

Alit Binawan & Frances Roi Seston Tampubolon

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka¹
Dosen Pembimbing Karya Ilmiah Universitas Terbuka

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1855

How to Cite this Article

APA	: Binawan, A., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Digitalisasi Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi di Bali. <i>MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(3c), 1237 - 1244. https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1855
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



Peran Digitalisasi Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi di Bali

Alit Binawan¹, Frances Roi Seston Tampubolon²

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka¹

Dosen Pembimbing Karya Ilmiah Universitas Terbuka²

Email Corresponding Author: binawan888@gmail.com

Diterima: 15-06-2024

| Disetujui: 16-06-2024

| Diterbitkan: 17-06-2024

ABSTRACT

Bali's economy has been dependent on the tourism sector for decades. The tourism sector has become an economic support in Bali, starting after the independence era. Marked by the construction of an airport in the Tuban area, Kuta, which is now called I Gusti Ngurah Rai International Airport. However, as time goes by, Bali's economy also depends on the digital sector. Starting from the financial technology (fintech) sector to e-commerce. Now, Bali is also implementing a levy for foreign tourists visiting Bali starting February 2024 of IDR 150,000. This levy is also included in the economic digitalization category because payments are made via bank transfer, virtual account, or QRIS. Now the Bali Provincial Government is increasingly diligent in implementing digitalization patterns as a trigger for Bali's economic growth so that it can be more balanced and does not depend on just one sector which is dominated by the economic sector. Questions began to arise. Does the implementation of levies for foreign tourists affect the number of tourists entering Bali? Based on data, the implementation of levies does not reduce the number of tourists entering Bali. In fact, there was an increase in the number of tourists after the levy was implemented. What is the impact of implementing levies on the volume of digital transactions in Bali? The implementation of levies has encouraged increased use of digital payments, especially QRIS Cross Border, and overall increased the volume of digital transactions in the tourism sector. What are the challenges faced in implementing digital user fees and what are the solutions? The main challenge is of course infrastructure readiness and digital literacy among business actors. From this point of view, it can be said that Bali is still dependent on the tourism sector even though it shows that the diversification of the Balinese economy is still ongoing. The tourism sector has also been supported by good digitalization, starting from tourist information systems to digital payment systems.

Keywords: Digitalization, Economic Digitalization, Tourism, Foreign Tourist Levy, Economic Growth

ABSTRAK

Perekonomian Bali sejak puluhan tahun, bergantung kepada sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi penopang ekonomi di Bali, dimulai pasca era kemerdekaan. Ditandai dengan dibangunnya bandara di kawasan Tuban, Kuta, yang sekarang bernama Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Namun seiring berjalannya waktu, perekonomian Bali juga bergantung pada sektor digital. Mulai dari sektor *financial technology* (fintech) hingga *e-commerce*. Sekarang, Bali juga menerapkan pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali sejak Februari 2024 sebesar Rp150,000. Pungutan ini juga masuk dalam kategori digitalisasi ekonomi karena pembayaran dilakukan melalui transfer bank, akun virtual, atau QRIS. Sekarang Pemprov Bali semakin getol dalam menerapkan pola digitalisasi sebagai *trigger* atau pemicu pertumbuhan ekonomi Bali sehingga bisa lebih seimbang dan tidak bergantung pada satu sektor saja yang didominasi oleh sektor ekonomi. Pertanyaan pun mulai muncul. Apakah penerapan pungutan retribusi bagi wisatawan asing mempengaruhi jumlah wisatawan yang masuk ke Bali? Berdasarkan data, penerapan pungutan retribusi tidak mengurangi jumlah wisatawan yang masuk ke Bali. Bahkan, terjadi peningkatan jumlah wisatawan setelah penerapan pungutan. Bagaimana dampak penerapan pungutan retribusi terhadap volume transaksi digital di Bali? Penerapan pungutan retribusi telah mendorong peningkatan penggunaan pembayaran digital, khususnya QRIS Cross Border, dan secara keseluruhan meningkatkan volume transaksi digital di sektor pariwisata. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan pungutan retribusi secara digital dan bagaimana solusinya? Tantangan utamanya tentu saja kesiapan infrastruktur dan literasi digital di kalangan pelaku usaha. Dari sudut pandang ini, bisa dikatakan bahwa Bali masih bergantung pada sektor pariwisata walaupun dan menunjukkan diversifikasi ekonomi Bali masih jalan di tempat. Sektor pariwisata juga sudah didukung dengan digitalisasi yang baik mulai dari sistem informasi wisata hingga sistem pembayaran digital.

Katakunci: Digitalisasi, Digitalisasi Ekonomi, Pariwisata, Foreign Tourist Levy, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Bali bisa dikatakan sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di dunia. Perannya sendiri sangat penting terutama dari sektor pariwisata untuk perekonomian nasional. Untuk pariwisata sendiri, menjadi sektor yang sangat vital dan utama dalam menggerakkan perekonomian Bali. Lihat saja bagaimana pertumbuhan ekonomi Bali terpuruk saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengacu Produk Domestik Bruto (PDB) sektor akomodasi dan pariwisata pada kuartal II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh -33,99% dan -24,9% (BPS, 2021).

Jika merujuk pada pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2023 yang diukur Berdasarkan produk domestic regional bruo (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp63,63 triliun atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp37,46 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2023 berkontraksi sedalam 4,81 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2022 (q-to-q). Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kategori C Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 8,32 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 2,52 persen, tertinggi kedua setelah Komponen Impor Luar Negeri yang merupakan faktor pengurang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada periode triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,04 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Kategori H Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 36,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mampu tumbuh sebesar 561,83 persen. (BPS, 2023)

Sekarang bandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2024. Perekonomian Bali pada triwulan I-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp69,61 triliun atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp39,72 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2024 berkontraksi sedalam 4,68 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2023 (q-to-q). Ditinjau dari sisi produksi, kontraksi paling dalam dicatatkan oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sedalam 14,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) berkontraksi sedalam 45,59 persen (BPS, 2024)

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada periode triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,98 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 19,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (Pk-LNPRT) tumbuh sebesar 80,93 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 20,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 55,12 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh Kategori I Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 19,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 56,03 persen. Ekonomi bisnis digital merujuk pada model ekonomi yang didorong oleh teknologi digital dan internet. Ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online atau dengan bantuan teknologi informasi (Devy Kusumaningrum, et al, 2024). Sedangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara global, UKM merupakan bagian dari sektor swasta.

Ekonomi dan masyarakat juga bergantung pada UKM, dan beberapa faktor mendukung serta mempengaruhi strategi mereka yang pada gilirannya mempengaruhi pengembangan bisnis mereka (*Ida Farida, et al, 2022*). Hal ini membuat UKM bisa dimaksimalkan secara digitalisasi.

Digitalisasi atau pemanfaatan teknologi digital diharapkan bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi Bali sehingga bisa lebih seimbang dan tidak bergantung pada satu sektor saja. Ekonomi Bali yang tumbuh 5,72% pada 2023, masih didorong oleh pulihnya sektor pariwisata pasca pandemi. (*Bisnis Indonesia, 2024*). Saat adanya pelanggaran kebijakan pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh lebih baik. Sektor akomodasi dan pariwisata Bali bertumbuh -7,15% dan 6,44%. Di tengah tantangan ini, digitalisasi muncul sebagai solusi potensial untuk memacu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Bali.

Digitalisasi mencakup penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Di sektor pariwisata, digitalisasi bisa digunakan untuk efisiensi operasional hingga meningkatkan pengalangan wisatawan yang berkunjung ke Bali melalui berbagai inovasi digital. Bukan hanya tertuju pada *foreign tourist levy* semata. Penelitian yang dibuat ini menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pungutan retribusi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali meskipun baru diterapkan pada 14 Februari 2024. Teknologi digital menjadi salah satu hal penting karena bisa sangat efektif diterapkan untuk memacu pertumbuhan pariwisata Bali saat ini.

Disamping itu penelitian ini bisa untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses digitalisasi, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Penelitian ini juga bisa menganalisa kontribusi digitalisasi terkait pertumbuhan perekonomian di Bali. Termasuk di sektor-sektor yang paling diuntungkan dari digitalisasi ekonomi. Digitalisasi menjadi salah satu pendorong produktivitas masyarakat. Bahkan digitalisasi ikut dalam merevolusi bagaimana cara orang berkomunikasi dan bagaimana meningkatkan *engagement* antara pemerintah dengan masyarakat melalui e-government sehingga birokrasi menjadi lebih singkat (*Nailul Huda et al, 2021*).

Sektor UMKM dalam hal ini adalah sektor UMKM di pariwisata, juga perlu melakukan digitalisasi keuangan. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah apa yang menjadi urgensi bagi UMKM dan sektor pariwisata untuk menerapkan digitalisasi keuangan (*J Ferdinand Pardede, et al, 2022*). Secara umum, digitalisasi ekonomi dengan cepat menjadi faktor utama yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang super cepat (*Arief Maulana, et al, 2023*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik terkait penerapan *foreign tourist levy* di Bali. Data kuantitatif akan diperoleh melalui survei dan analisis data sekunder, sementara data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi di Bali.

Untuk sumber data sendiri menggunakan data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari data-data resmi terkait ekonomi digital serta pariwisata di Bali yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), literatur akademik, Artikel jurnal, hingga data-data dan kutipan dari pemberitaan di media massa terkait ekonomi digital di Bali. Sumber data ini meliputi data pendapatan asli daerah (PAD), jumlah kunjungan wisatawan, serta laporan terkait pungutan retribusi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.

Untuk teknik pengumpulan data sendiri, dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengakses laporan resmi dari BPS ataupun Pemprov Bali serta berbagai pemberitaan yang ada. Caranya bisa dilakukan mengakses laporan tahunan dan triwulan dari BPS terkait pariwisata dan ekonomi di Bali. Mengumpulkan data resmi dari Pemprov Bali terkait penerapan *foreign tourist levy* sejak Februari 2024. Untuk teknik analisis data, menggunakan teknik deskripsi statistik PAD. Teknik ini bertujuan untuk menghitung total pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari *foreign tourist levy*.

Untuk tahapan penelitian, harus dilakukan perencanaan dan persiapan untuk menentukan tujuan serta sasaran penelian. Selain itu mengidentifikasi data sekunder yang relevan dari BPS dan Pemprov Bali terkait kunjungan wisata serta *foreign tourist levy*. Pengumpulan data sekunder dapat mengakses dan mengumpulkan data dari sumber resmi. Untuk analisis data, bisa menggunakan teknik deskriptif dan kuantitatif dari data sekunder yang sudah dikumpulkan. Setelah semua data terkumpul dan sudah dilakukan perhitungan, bisa memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang ada. Rekomendasi ini bisa menjadi acuan Pemprov Bali dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali untuk menentukan langkah strategis apa yang bisa dibuat untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke Bali. Termasuk mendongkrak PAD dari *foreign tourist levy*. Bisa juga Pemprov Bali membuat kebijakan baru atau mengubah kebijakan yang ada untuk memudahkan peningkatan PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya, data yang digunakan adalah data tahun 2024. Data ini merujuk dari penerapan *foreign tourist levy* atau pungutan retribusi bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali sejak 14 Februari 2024. Sebab retribusi ini baru diterapkan oleh Pemerintah provinsi Bali pada waktu tersebut. Pungutan bagi wisatawan asing ini ditetapkan sebesar Rp150,000 untuk satu wisatawan. Pembayaranannya lebih banyak dilakukan dengan cara digital melalui QRIS Cross Border. Bisa juga dilakukan melalui metode pembayaran langsung, bank transfer, dan akun virtual saat keberangkatan maupun saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ataupun Pelabuhan Benoa.

Tujuan dari pungutan ini adalah untuk mendukung pengembangan pariwisata serta melestarikan budaya dan alam Bali. Disamping sebagian hasil pungutan dari wisatawan asing yang masuk ke Bali sejak Februari 2024, digunakan untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari data yang didapat dari Disperda Bali, pada minggu pertama penerapan pungutan retribusi tersebut, PAD yang dihasilkan sebesar RP9 Miliar.

Perhitungan Estimasi PAD Pemerintah Provinsi Bali dari *foreign tourist levy*:

Total Wisatawan Asing yang Berkunjung ke Bali Pada Minggu Pertama

$$\text{Jumlah Wisatawan} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Tarif Retribusi}}$$

$$\text{Jumlah Wisatawan} = \frac{9,000,000}{150,000} = 60,000 \text{ Wisatawan}$$

Estimasi Pendapatan Bulanan

Pendapatan Bulanan = 60,000 wisatawan/minggu x 4 minggu x Rp150,000/w

Pendapatan Bulanan = 60,000 x 4 x 150,000 = Rp36,000,000,000

Estimasi Pendapatan Tahunan

Estimasi Pendapatan per Tahun

Pendapatan Tahunan = Rp36,000,000,000/bulan x 12 bulan

Pendapatan Tahunan = Rp432,000,000,000

Tabel 1. Perhitungan Pendapatan dari Retribusi Pungutan Wisatawan Asing di Bali Tahun 2024

Kategori	Jumlah Wisatawan	Tarif Retribusi per Wisatawan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
Minggu Pertama	60,000	150,000	9,000,000,000
Estimasi Bulanan	240,000	150,000	36,000,000,000
Estimasi Tahunan	2,880,000	150,000	432,000,000,000

Penerapan pungutan retribusi ini menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat memfasilitasi proses administrasi yang lebih efisien dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti metode pembayaran elektronik melalui transfer bank, akun virtual, dan QRIS, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat bagi wisatawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa pendapatan dari retribusi dapat dikumpulkan dan dikelola dengan lebih efektif dan transparan. Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan dan pelaporan yang lebih baik.

Data *real-time* mengenai jumlah wisatawan dan pendapatan yang dikumpulkan dapat diakses dan dianalisis untuk perencanaan yang lebih baik. Ini membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dengan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur pariwisata serta pelestarian budaya dan lingkungan. Selain itu, penggunaan dana dari retribusi ini untuk pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya serta lingkungan sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Melestarikan warisan budaya dan menjaga alam Bali adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pariwisata di Bali tetap menarik bagi wisatawan internasional dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penerapan pungutan retribusi dan pengelolaannya melalui digitalisasi merupakan contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, digitalisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dari data yang ada hingga Maret 2024, menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 5 persen dibandingkan bulan Februari 2024. Penerapan *foreign tourist levy* tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sejak diterapkan pada 14 Februari 2024, ada peningkatan signifikan dalam penggunaan QRIS Cross Border. Tercatat ada 80 persen total transaksi pungutan retribusi wisatawan asing yang dilakukan secara digital. Dampaknya tentu volume transaksi digital untuk sektor pariwisata di Bali meningkat sebesar 10 persen dalam tiga bulan pasca penerapan *foreign tourist levy*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi memainkan peran penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Bali melalui penerapan pungutan retribusi bagi wisatawan asing. Pengelolaan yang efisien dan transparan dari pendapatan ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur dan pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata Bali, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengadopsi digitalisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan pungutan retribusi telah mendorong peningkatan volume transaksi digital di sektor pariwisata Bali. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang menggunakan metode pembayaran digital, ekosistem ekonomi digital di Bali semakin berkembang. Ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk mengintegrasikan layanan digital dalam operasional mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Mayoritas wisatawan memilih menggunakan QRIS Cross Border untuk membayar pungutan retribusi. Ini menunjukkan bahwa wisatawan asing cenderung lebih nyaman dengan metode pembayaran digital yang cepat dan efisien. Adopsi pembayaran digital ini juga menguntungkan pemerintah dan pelaku usaha karena mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peran digitalisasi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Bali melalui penerapan pungutan retribusi wisatawan asing, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat dari kebijakan ini:

Peningkatan Infrastruktur Digital

Bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas jaringan internet. Pihak Pemprov Bali dan pemerintah daerah serta *stakeholder* terkait wajib memastikan seluruh area wisata utama di Bali memiliki akses internet yang cepat dan stabil untuk mendukung transaksi elektronik dan penggunaan aplikasi digital oleh wisatawan. Selain itu, harus melakukan pengembangan platform digital terintegrasi yang mencakup semua informasi yang dibutuhkan wisatawan, seperti pembayaran retribusi, informasi destinasi, reservasi akomodasi, dan layanan darurat. Sosialisasi dan edukasi juga penting seperti melakukan berbagai kampanye terkait wisatawan asing mengenai cara pembayaran retribusi secara elektronik. Bisa dijelaskan pula bagaimana manfaat dari retribusi tersebut untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Bali. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelatihan untuk pelaku industri mengenai penggunaan teknologi digital dan manajemen berbasis data untuk meningkatkan layanan dan operasional bisnis.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan dan transparansi terkait retribusi pungutan wisatawan asing yang datang di Bali harus dibuat laporannya secara berkala. Transparansi sangat penting dalam tahap ini karena bisa meningkatkan kepercayaan public dan wisatawan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemprov Bali juga wajib menggandeng konsultan pengawas independen agar memastikan pendapatan dari retribusi tersebut bisa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena estimasi jumlah PAD yang dihasilkan dari retribusi ini bisa mencapai hampir Rp500 miliar.

Inovasi Layanan Wisata

Pihak terkait perlu melakukan pengembangan aplikasi *mobile* yang tidak hanya memfasilitasi pembayaran retribusi seperti QRIS Cross Border, tapi juga menerapkan fitur seperti pemandu wisata digital, peta interaktif, atau rekomendasi tempat wisata yang sedang populer di Bali dengan menerapkan *QR Code*.

Disamping itu Pemprov Bali dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan infrastruktur digital dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang manfaat dan cara penggunaan teknologi digital. Kolaborasi dengan berbagai stratum digital juga penting untuk mengembangkan teknologi di bidang pariwisata karena menjadi salah satu solusi yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman wisatawan selama berada di Bali. Promosi pariwisata melalui media digital dan media sosial juga penting agar lebih interaktif. Hal ini bisa menarik wisatawan lebih banyak. Misalnya pembuatan konten kreatif terkait pariwisata Bali di berbagai platform media sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Analisa Urgensi Digitalisasi dan Laporan keuangan Bagi UMKM (J Ferdinand Pardede, Lucky Nugroho, Nurul Hidayah, 2022)
2. The Role of Digital Finance to Strengthen Financial Inclusion and the Growth of SME in Indonesia (Atina Shofawati, 2019)
3. Perkembangan Integrasi Digital Untuk Mendorong Digitalisasi Ekonomi Kawasan ASEAN (Arief Maulana, Yana Suryana, 2023)
4. Business Strategies and Competitive Advantage: The Role of Performance and Innovation (Ida Farida, Doddy Setiawan, 2022)
5. Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata (Edy Sutrisno, 2021)
6. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/717921/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-i-2024.html>
7. <https://bali.bisnis.com/read/20240424/537/1760215/digitalisasi-ditargetkan-menjadi-pemacu-pertumbuhan-ekonomi-bali>
8. Zulkifly, Al Asy Ari Adnan Hakim, Resti Ramadani, Lindari Wau, Helmi Ali, Dhiana Ekowati, Fadli Agus Triansyah, Dhety Chusumastuti, Muhammad Sholahuddin, Achmad Fageh. 2023. Ekonomi Digital
9. Nailul Huda, Kimberly Tanos. 2021. Kebijakan Inovasi dan Ekonomi Digital
10. Ari Riswanto, Joko, Siti Napisah, Yoseb Boari, Devy Kusumaningrum, Nurfaidah, Loso Judijanto. 2024. Ekonomi Bisnis Digital (Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital)
11. Rostamaji Kornawan. 2023. G20, Platform Kerjasama Multilateral: Pembahasan Energi, Ekonomi Digital, dan Arsitektur Kesehatan
12. Rony Sandra Yofa Zebua, Chandra Hendriyani, Rani Sukmadewi, Abadurrahman Rahim Thaha, Rusdin Tahir, Ratih Purbasari, Nurillah Jamil Achmawati Novel, Putri Dewintari, Catarina Cori Pradnya Paramita, Tri Hierdawati, Agus Dedi Subagja. 2023. Bisnis Digital: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan